

Direkam di sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP-el ku Datang: Inovasi Pemerintah Kota Surakarta

Damai Ria

Abstrak

Inovasi E-KTP adalah metode dalam meningkatkan pelayanan publik yang optimal, dengan catatan bahwa inovasi dapat memperbaharui sistem yang tidak efektif terutama dalam bidang pencatatan sipil. Dalam pelayanan publik yang optimal, respon masyarakat juga menjadi hal penting dalam akuntabilitas suatu kebijakan publik. Hal ini tertuang dalam contoh kebijakan inovasi E-KTP di Surakarta yaitu "Direkam di sekolah, Sweet Seventeen, KTP-el ku Datang" yang dilakukan oleh Dukcapil. Kebijakan ini berisikan program tentang perekaman E-KTP yang dilakukan di sekolah, lokasi seorang individu yang sudah berumur 17 tahun. Tujuan dari adanya inovasi ini adalah memudahkan individu yang memiliki status sebagai seorang pelajar agar dapat memiliki kelengkapan identitas kenegaraan. Adanya inovasi pun juga diharapkan agar manajemen administrasi dapat terstruktur secara sistematis di bidang pencatatan sipil, agar setiap perhitungan secara statistik kependudukan dapat dihitung dengan efektif dan efisien. Kebijakan ini diharapkan dapat berjalan dengan capaian yang lebih baik.

Kata Kunci: KTP El, Umur 17 Tahun, Pencatatan Sipil.

Abstract

E-KTP innovation is a method of improving optimal public services, noting that innovation can renew ineffective systems, especially in the field of civil registration. In optimal public service, community response is also important in the accountability of a public policy. This is stated in the example of the E-KTP innovation policy in Surakarta, namely "Recorded at school, Sweet Seventeen, KTP-el ku Datang" conducted by Dukcapil. This policy contains a program about E-KTP recording carried out in schools, the location of an individual who is 17 years old. The purpose of this innovation is to make it easier for individuals who have a status as a student to have complete state identity. The existence of innovation is also expected so that administrative management can be structured systematically in the field of civil registration, so that every statistic calculation of population can be calculated effectively and efficiently. This policy is expected to work better.

Keywords: El KTP, Age 17 Years, Civil Registration.

Direkam di sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP-el ku Datang: Inovasi Pemerintah Kota Surakarta

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi (TI) mengalami perkembangan yang luar biasa. Di Indonesia saat ini banyak inovasi dan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah dari berbagai kementerian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Pada saat ini telah dimunculkan kembali suatu inovasi atau program yang ditujukan untuk melayani masyarakat terkait dengan kartu

kependudukan di Surakarta utamanya bagi pemegang KTP pemula melalui program Direkam di sekolah, *sweet seventeen*, KTP-el ku datang. KTP elektronik (E-KTP) adalah program yang dirancang menjadi kartu identitas penduduk yang bersifat seumur hidup dengan memanfaatkan teknologi informasi. Direkam di sekolah, *sweet seventeen*, KTP-elku datang merupakan suatu program yang dapat dikatakan menjadi suatu program yang unggul apabila program tersebut memuat nilai cerdas, bijaksana dan memberikan harapan. Suatu program dapat terlihat apakah program tersebut merupakan program yang unggul atau bukan dapat dilihat dari implementasi program tersebut.

Penerapan awal KTP yang berbasis NIK dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau e-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP adalah kartu identitas penduduk yang berbasis teknologi database kependudukan nasional. Artinya, data penduduk tidak lagi disimpan di kelurahan atau daerah tempat tinggal masing-masing seperti sebelumnya, melainkan di dalam satu database nasional. Penduduk diperbolehkan hanya memiliki satu e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal yang berlaku seumur hidup.

Inovasi dalam e-ktp adalah untuk mempercepat dan mengefektifkan kinerja dari dinas terkait, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta untuk mempermudah dalam melaksanakan berbagai pelayanan pada masyarakat. Inovasi sendiri dibuat oleh pemerintah agar dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, diharapkan dengan adanya inovasi yang dibuat oleh pemerintah dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan. Tentu inovasi ini membawa pengaruh yang baik bagi kemajuan Kota Surakarta.

Inovasi Program Direkam di sekolah, *sweet seventeen*, KTP-elku datang dilakukan agar penduduk pemula bisa memiliki KTP Elektronik (E-KTP) secara tepat waktu dan mudah. Hal ini sebagai wujud pelayanan prima yang aktif. Hal ini sesuai dengan Program 5 mantap dari Walikota Surakarta khususnya mantap pelayanan. Motto dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta: Melayani sepenuh hati dengan inovasi. Sejak Kebijakan KTP Elektronik (E-KTP) diluncurkan Oleh Pemerintah pusat pada tahun 2011, teknis proses kepemilikan KTP Elektronik lebih kompleks daripada KTP reguler, karena warga harus datang sendiri direkam (difoto, di rekam pusat, teknis proses pembuatan KTP Elektronik lebih kompleks daripada KTP seluruh sidik jari, iris mata tandatangan secara elektronik), data harus terkirim secara online ke Kementerian dalam negeri untuk proses penunggalan baru bisa dicetak. Artinya bahwa untuk cetak KTP Elektronik melalui prosedur yang lebih panjang. Apalagi di usia pelajar, masih banyak yang belum sadar akan arti pentingnya memiliki KTP Elektronik. Mereka lebih senang memiliki Kartu Pelajar. Oleh sebab itu program ini diawali dengan sosialisasi kepada pelajar tentang akan arti pentingnya KTP El. Sehingga sekaligus bisa memberikan praktek pendidikan kewarganegaraan. Penduduk termasuk pelajar usia 17 Tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk. Hal ini sesuai dengan hak dan kewajiban warga Negara. Dengan memiliki KTP elektronik tepat waktu, penduduk wajib yang KTP pemula bisa segera memproses SIM, lebih mudah mengakses dalam pelayanan Perbankan, demokrasi/ Pemilu, dan hak hak lainnya sebagai konsekuensi sudah memasuki usia dewasa. Adanya Layar belakang tersebut membuat penulis memiliki rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Direkam di sekolah, *sweet seventeen*, ktp-el ku datang?

2. Bagaimana partisipasi dalam program Direkam di sekolah, *sweet seventeen*, ktp-el ku datang?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian mengenai inovasi program direkam di sekolah, *sweet seventeen*, ktp-el ku datang adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan program direkam di sekolah, *sweet seventeen*, ktp-el ku datang
2. Menjelaskan partisipasi dalam program direkam di sekolah, *sweet seventeen*, ktp-el ku datang

TEORI

Inovasi Pemerintah daerah

Istilah inovasi memang diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Inovasi dalam arti yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Namun demikian, dalam pemasaran dan konteks perilaku konsumen inovasi dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang berbeda yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya yang pernah ditemui konsumen di pasar.

Menurut Sutarno (2012) Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti. Inovasi adalah transformasi pengetahuan pada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru. Inovasi juga merupakan eksploitasi yang berhasil dari gagasan baru atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa baru. Inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.

Inovasi Pelayanan Publik

Secara khusus inovasi dalam lembaga publik dapat diartikan sebagai penerapan (upaya membawa) ide-ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh adanya perubahan langkah yang cukup besar, berlangsung lama dan berskala cukup umum sehingga dalam implementasinya berdampak cukup besar terhadap organisasi dan tata hubungan organisasi. Inovasi pelayanan publik mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang *intangibile* karena inovasi layanan dan organisasi tidak semata berbasis pada produk yang dapat dilihat melainkan pada perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara *service provider* dan *service receiver (user)*, atau hubungan antar berbagai bagian di dalam organisasi atau mitra sebuah organisasi.

Halversen (2005) membagi tiga tipe spektrum inovasi dalam sektor public:

1. ***Incremental innovation to radical innovation***: Ditandai oleh tingkat perubahan, perbaikan incremental terhadap produk, proses layanan yang suda ada

2. *Top down innovation to bottom-up innovation*: Ditandai oleh mereka dalam mengawali proses dan mengarah kepadaperubahan perilaku dari top manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirarki, bermakna dari para pekerja tingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah.

3. *Need led innovations and efficiency-led innovation*: Ditandai apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien.

Robbins (1994) lebih memfokuskan pada tiga hal utama dalam inovasi pelayanan publik yaitu :

1. Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan, gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal.
2. Produk dan jasa yaitu hasil dari langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang dikembangkan dan diimplementasikan termasuk hasil inovasi dibidang pendidikan.
3. Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

Partisipasi

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta memanfaatkan dan menikmati hasil –hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Partisipasi dapat berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat mengenai gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan yakni penggerakan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan rencana yang telah digagas sebelumnya yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang sudah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat melalui output, sedangkan dari segi kuantitas dapat melalui presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Partisipasi dalam evaluasi ini mempunyai untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:6) berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *random*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Situs Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dan SMA maupun SMK di kota Surakarta

3. Subjek Penelitian

Dalam pengambilan sampel wawancara atau informan peneliti menetapkan secara sengaja atau direncanakan agar sesuai dengan permasalahan yang diambil. informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan kota Surakarta
3. Kepala Sekolah SMA SMK di Surakarta yang telah ditentukan

4. Sumber Data

- a. Data Primer. Wawancara dengan Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surakarta, Kepala dinas pendidikan kota Surakarta, dan Kepala Sekolah SMA dan SMK di Kota Surakarta.
- b. Data sekunder. Dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku. Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah meliputi buku-buku kepustakaan, laporan, buku harian, arsip-arsip, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

6. Analisis dan Interpretasi Data

Dengan tahapan atau komponen sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data mentah.
- b. Mengelompokkan dan mengorganisaikan
- c. Membaca semua data.
- d. Memberikan kode pada data.
- e. Pemberian kode berdasarkan Tema.
- f. Deskripsi.
- g. Menghubungkan satu tema dengan tema lainnya.

h. Interpretasi makna tentang Tema.

7. Kualitas Data

Skripsi ini menggunakan teknik triangulasi, dimana menggunakan empat hal yang meliputi triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Metode
2. Triangulasi dengan Penyidikan
3. Triangulasi dengan Sumber
4. Triangulasi Teori

HASIL PENELITIAN

Implementasi Inovasi Program Direkam di Sekolah, *Sweer Seventeen*, KTP El Ku Datang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP), akte kelahiran, Kartu Keluarga dan urusan kependudukan dan identitas lainnya yang meningkat kebutuhannya setiap tahunnya. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang baik dan cepat dari pemerintah, tetapi dalam kenyataannya, tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena pada realitanya pelayanan publik yang terjadi masih berbelit-belit, lambat, dan melelahkan. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisi sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi pelayanan publik yang seharusnya mengembalikan dan mendudukan “pelayan” dan yang “dilayani” pada pengertian yang sesungguhnya.

Fungsi pemerintahan daerah meliputi 3 hal yaitu memberikan pelayanan (*service*), membuat pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*) dan pemberdayaan (*empowering*). Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sampai dengan kepada dinas tertentu yang terkait memiliki tujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam organisasi sektor publik maupun pemerintahan. Berbagai metode dan bentuk manajemen dalam publik dan pemerintahan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, apalagi menghadapi era globalisasi persaingan yang semakin ketat diperlukan regulasi yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi yang mendorong kearah efektivitas dan efisiensi, oleh karena itu aparat pemerintah harus tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Suwarno (2008:26) bagi sektor publik, berinovasi lebih merupakan tuntutan akuntabilitas, transparansi dan berbagai prinsip *good governance* yang menggiring organisasi publik yang berkinerja lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang pentingnya inovasi di sektor publik diantara lain:

- a) Banyaknya teknik-teknik manajemen yang berfokus pada *just-in-time*, *supply chain management*, *outsourcing*, dan *total quality atau business process re-engineering* yang dipakai oleh berbagai perusahaan medium maupun besar untuk bertahan dan bersaing satu sama lain. Namun hanya sedikit yang berani untuk keluar dari mainstream dan menciptakan terobosan-terobosan baru.
- b) Teknik-teknik manajemen tradisional di atas juga menggiring organisasi pada pola rigiditas dan infleksibilitas.
- c) Dampak dari inovasi dapat dirasakan dan terlihat pada kinerja dan keuntungan organisasi di level *bottom line*.

Inovasi layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yakni inovasi program Direkam di Sekolah, *Sweer Seventeen*, KTP El Ku Datang yang telah dilaksanakan tersebut mendapat apresiasi dari Sinovik yakni Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)

secara nasional yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik Indonesia, termasuk pemberian penghargaan kepada instansi pemerintah yang mempunyai inovasi pelayanan publik terbaik, salah satunya adalah Inovasi Program Direkam di Sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP El ku Datang yang merupakan inovasi program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan masuk kategori top 99 inovasi pelayanan publik pada tahun 2017.

“Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta ini, setiap harinya selalu memikirkan inovasi-inovasi apa yang harus dilakukan terkait dengan pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, dengan adanya inovasi maka akan lebih mempermudah akses masyarakat serta memperbaiki pelayanan yang ada menjadi lebih baik.

(Hasil Wawancara mendalam dengan Bapak Suwarta, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 22 Oktober 2018)

Awal mula tercetusnya inovasi program Direkam di Sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP El Ku Datang adalah semenjak diberlakukan KTP elektronik, cakupan rekam E-KTP di Kota Surakarta belum sesuai harapan. Dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebesar 412.329 jiwa di tahun 2012, baru 242.448 jiwa atau sebesar 58,79% yang melakukan perekaman KTP elektronik, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kurangnya akses penduduk ke tempat perekaman baik karena keterbatasan biaya maupun waktu. Keterbatasan waktu untuk dapat melakukan perekaman data KTP elektronik terutama bagi siswa yang tidak dapat meninggalkan jam pelajaran mempengaruhi cakupan perekaman E-KTP. Sebagian siswa enggan untuk meninggalkan pelajaran dan melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses yang lama serta prosedur persyaratan yang sesuai dengan aturan yang ada membuat siswa enggan mengurus dan melakukan perekaman KTP elektronik.

“Pertama kali adanya program Direkam di sekolah, *sweet seventeen*, KTP El ku Datang ini dibuat untuk mengatasi permasalahan pembuatan E-KTP khususnya bagi pelajar, karena pelajar masih belum paham pentingnya punya E-KTP dan tidak perlu antri di kantor Dukcapil. “

(Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 22 Oktober 2018)

Ada banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan inovasi ini, yaitu terpenuhinya hak atas identitas penduduk dan hak administrasi kependudukan siswa (memiliki E-KTP) tanpa harus meninggalkan waktu belajar di sekolah, sehingga hak atas pendidikan dan mendapatkan pelajaran tetap terpenuhi. Dalam bidang politik, dengan dilaksanakannya inovasi ini, siswa juga terpenuhi hak politiknya, karena dengan memiliki KTP elektronik, siswa berhak mengakses hak politik seperti mengikuti Pilkada. Selain itu, dengan dilaksanakannya inovasi ini, siswa sudah bisa mengakses pelayanan publik lainnya seperti mendapatkan SIM, Passpor, Perbankan, Jaminan Kesehatan, Transportasi dan yang lainnya secara tepat waktu.

Dari segi database perekaman, jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman meningkat. Di tahun 2016 jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman sejumlah 414.054 jiwa atau sebesar 97,04 % dari total jumlah penduduk wajib KTP yaitu sebesar 426.663 jiwa. Pelaksanaan inovasi ini juga menyederhanakan persyaratan untuk perekaman dan pengambilan KTP elektronik. Untuk melakukan perekaman, siswa cukup membawa *fotocopy* Kartu Keluarga, sedangkan untuk pengambilan siswa hanya perlu membawa surat panggilan dalam bentuk surat undangan pengambilan dan ucapan selamat ulangtahun dari Walikota

Surakarta untuk mengambil KTP elektronik serta tidak perlu melalui antrian karena telah disediakan loket khusus untuk KTP elektronik pemula yang sudah mendapatkan undangan.

Untuk melakukan perekaman, siswa cukup membawa *fotocopy* Kartu Keluarga, sedangkan untuk pengambilan siswa hanya membawa surat panggilan untuk mengambil KTP elektronik serta tidak perlu melalui antrian (disediakan loket khusus untuk KTP elektronik pemula). Kegiatan yang dilaksanakan dalam inovasi ini tidak memungut biaya alias gratis baik dari siswa maupun pihak sekolah. Inovasi ini akan dikembangkan pelaksanaannya ke sekolah-sekolah difabel di Kota Surakarta. Perekaman yang dilakukan pada sekolah-sekolah difabel akan dilaksanakan mulai tahun 2017. Selain itu program juga akan dilaksanakan di yayasan-yayasan yang menampung penduduk difabel.

Waktu pelaksanaan program Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen, KTP El Ku Datang biasanya dilaksanakan setelah penerimaan siswa baru pada bulan Agustus sampai dengan November, tetapi jadwal pelaksanaan tersebut bisa berubah tergantung situasi dan kondisi serta agenda di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil datang ke sekolah untuk melakukan perekaman pada hari dan jam kerja yakni pada hari Senin-Jumat pukul 08.00 s.d pukul 14.00 WIB, kecuali pada hari Jumat, program dilaksanakan pada pukul 08.00 s.d pukul 11.00 WIB. Pihak sekolah menyediakan data siswa nya, ruangan dan mengatur waktu bagi siswa untuk direkam sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Perekaman yang dilakukan pun berjalan dengan cepat, hanya membutuhkan waktu 2-3 menit per orang untuk melakukan perekaman.

Waktu pelaksanaan program Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen, KTP El Ku Datang biasanya dilaksanakan setelah penerimaan siswa baru pada bulan Agustus sampai dengan November, tetapi jadwal pelaksanaan tersebut bisa berubah tergantung situasi dan kondisi serta agenda di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Tim dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil datang ke sekolah untuk melakukan perekaman pada hari dan jam kerja yakni pada hari Senin-Jumat pukul 08.00 s.d pukul 14.00 WIB, kecuali pada hari Jumat, program dilaksanakan pada pukul 08.00 s.d pukul 11.00 WIB. Pihak sekolah menyediakan data siswa nya, ruangan dan mengatur waktu bagi siswa untuk direkam sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Perekaman yang dilakukan pun berjalan dengan cepat, hanya membutuhkan waktu 2-3 menit per orang untuk melakukan perekaman.

Partisipasi Siswa dalam Inovasi Program Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen, KTP El Ku Datang

Pada dasarnya peran masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta memberikan kemudahan bagi masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan. Partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik serta partisipasi digunakan sebagai penilai apakah pelayanan yang diberikan sudah berhasil atau belum, memuaskan atau tidak memuaskan bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang penting dilakukan karena masyarakat secara langsung sebagai pengguna pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Menurut pasal 39 UU Pelayanan Publik, peran serta masyarakat dibutuhkan pada seluruh proses penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat diantaranya bersinggungan dengan penyusunan kebijakan dan standar pelayanan publik. Serta, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam pengawasan, ketentuan tersebut mengamanatkan untuk dibentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.

Siswa yang direkam adalah yang berusia 15 tahun dan mempunyai KK Kota Surakarta. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta berkoordinasi dengan sekolah-sekolah dalam pelaksanaan program ini. Dalam pelaksanaan program Direkam di Sekolah, Sweet Seventeen, KTP El Ku Datang mendapat antusiasme yang besar dari siswa-siswa SMA, SMK, SMA LB negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat pada saat petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta baru saja datang, siswa-siswa kelas 10 tersebut sudah menunggu di aula sekolah untuk melakukan perekaman E-KTP. Bahkan kelas yang belum dipanggil sudah menunggu antrean untuk dipanggil oleh petugas. Kemudian petugas memanggil siswa tersebut satu per satu untuk melakukan perekaman E-KTP. Siswa-siswa tersebut pun aktif dalam menanyakan permasalahan E-KTP, pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh siswa-siswa tersebut adalah kapan E-KTP milik mereka dapat diambil serta bagaimana cara pengambilan E-KTP tersebut. Dalam pelaksanaan program ini, siswa-siswa juga didampingi oleh guru mereka.

Data adanya partisipasi dari pelaksanaan inovasi ini diantaranya adalah :

- Cakupan penduduk usia wajib KTP pemula (17 tahun) yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik meningkat. Tahun 2016 wajib KTP pemula yang sudah melakukan perekaman sebanyak 7.223 jiwa dari total wajib KTP pemula sebanyak 8.757 jiwa, atau sebesar 82,48%.
- Cakupan penduduk usia wajib KTP pemula (17 tahun) yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik meningkat. Tahun 2017 wajib KTP pemula yang sudah melakukan perekaman sebanyak 8.412 jiwa dari total wajib KTP pemula sebanyak 8.383 jiwa, atau sebesar 99,65%.

Data Jumlah siswa yang direkam di sekolah setiap tahun:

- Tahun 2013 sebanyak 10.343 jiwa, tahun ini merupakan tahun awal perekaman, maka siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 direkam semua;
- Tahun 2014 sebanyak 4.996 jiwa. Jumlahnya menurun karena yang direkam hanya siswa kelas 1 saja, siswa kelas 2 dan 3 sudah direkam tahun 2013;
- Tahun 2015 sebanyak 3.340 jiwa;
- Tahun 2016 sebanyak 4.885 jiwa;
- Tahun 2017 sebanyak 5.640 jiwa

Data penduduk yang sudah melakukan perekaman E-KTP

TAHUN	WAJIB KTP	PENDUDUK USIA 17 TAHUN	USIA 17 TAHUN YANG SUDAH REKAM DAN CETAK KTEL	PRESENTASE%
2012	412.329	9.049	831	9,18
2013	406.682	8.675	6.387	73,63
2014	413.852	8.210	7.527	91,68
2015	416.163	8.342	7.999	95,89
2016	426.663	8.664	8.510	98,22

2017	414.389	8.412	8.383	99,60
------	---------	-------	-------	-------

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa partisipasi siswa dalam Inovasi Program Direkam di Sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP El Ku Datang sudah baik. Kesadaran siswa akan pentingnya kepemilikan E-KTP juga sudah meningkat

PENUTUP

Simpulan

Implementasi program Direkam di Sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP El Ku Datang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan indikator keberhasilan. Partisipasi masyarakat khususnya pelajar terhadap program Direkam di Sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP El Ku Datang sangat baik selain itu siswa SMA SMK di Kota Surakarta mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan program, maka dari itu implementasi program bisa berjalan dengan baik. Keterbatasan waktu untuk dapat melakukan perekaman data KTP elektronik terutama bagi siswa yang tidak dapat meninggalkan jam pelajaran mempengaruhi cakupan perekaman KTP elektronik. Sebagian siswa enggan untuk meninggalkan pelajaran dan melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses yang lama serta prosedur persyaratan yang rumit membuat siswa enggan mengurus dan melakukan perekaman KTP elektronik. Kebanyakan mereka hanya mengurus jika sedang membutuhkannya. Implementasi program Direkam di Sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP El Ku Datang biasanya dilaksanakan setelah adanya penerimaan siswa baru yaitu sekitar pada bulan Agustus setiap tahunnya. Tetapi jadwal ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Tujuan yang ingin dicapai dari program ini adalah meningkatkan cakupan perekaman KTP elektronik serta memberikan hak sipil kependudukan bagi kaum muda tepat pada waktunya, dimana KTP elektronik yang telah dilakukan perekaman datanya di sekolah akan dicetak dan diberikan tepat ketika berusia 17 tahun yang merupakan usia wajib KTP. Dengan melakukan perekaman data E-KTP di sekolah, siswa tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pelajaran di sekolah karena tidak perlu meninggalkan jam pelajaran. Setelah berumur 17 tahun, maka akan diberikan undangan beserta ucapan selamat ulangtahun dari Walikota Surakarta melalui pengiriman yang dilakukan oleh Kantor Pos yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Saran

Dengan adanya suatu pembaruan dalam pelayanan publik khususnya pembuatan E-KTP bagi pelajar, pemerintah Kota Surakarta dapat mendukung dan lebih memperhatikan hak pelajar dalam memiliki kartu identitas kependudukan, dengan adanya inovasi pelayanan publik bagi masyarakat khususnya pelajar dimana peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga harus melibatkan kerja sama yang padu antar instansi pemerintah, peran swasta serta *citizen* (masyarakat) dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima. Dalam pemberian pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dalam kemudahan akses untuk memiliki E-KTP serta dapat mengembangkan perencanaan inovasi pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan khususnya bagi pelajar ke kota-kota lainnya agar supaya inovasi program Direkam di Sekolah, *Sweet Seventeen*, KTP El Ku Datang dapat berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang serta dapat dicontoh oleh kota-kota lain untuk mendukung program pemerintah dalam tertib administrasi.

Daftar Pustaka

- Agus Purwanto, Erwan, & Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ahmed, Pervaiz K, & Shepherd, Charles D. 2010. *Innovation Management*. New Jersey: Pearson Education.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita.
- Djamrut, Dayang Erawati. 2015. Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan* 3 (3). Hal 1472-1486
- Echols, John M & Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Eko Indrajit, Richardus. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Halvorsen, Thomas, et al. 2005. *On the Differences between Public and Private Sector Innovations*. Oslo: Publin Report.
- Indrajit, Richardus Eko dkk. 2005. *E-GOVERNMENT IN ACTION, Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. Jakarta: Penyusunan Standar Pelayanan Publik. LAN
- M. Tahir, Muchlas & Harakan, Ahmad. 2014. *Inovasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Masrin. 2013. Studi tentang pelayanan pembuatan KTP elektronik (E-KTP) di kantor kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. *eJournal Pemerintahan Integratif* (1) 1. Hal 68-81
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Prianto, Agus. 2006. *Menakar Kualitas Pelayanan Publik*. Malang: In-Trans.
- Rahmat, Agung. 2016. *Inovasi Birokrasi Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik di Kota Solok Sumatera Barat*. Bandung: Universitas Padjajaran.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Jakarta: Arcan.
- Sangkala. 2013. *Innovative Government*. Yogyakarta: Capiya Publishing

- Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-LAN
- Tilaar, H. A. R. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Thoah, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Vontana, Avanti. 2009. *Manajemen Inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: Grasindo
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pers.

Website

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id/> (diakses pada 21 Mei 2017)

<http://www.kemenkumham.go.id/berita/1241-ciptakan-inovasi-pelayanan-publik-yang-berbasis-teknologi-informasi> (diakses pada 25 Mei 2017)

<https://www.menpan.go.id> (diakses pada 20 Mei 2017)

<https://surakartakota.bps.go.id> (diakses pada 27 Mei 2017)

[https://www.scribd.com/doc/98370304/Interpretasi-Data-Dan-Penarikan_Kesimpulan-Penelitian](https://www.scribd.com/doc/98370304/Interpretasi-Data-Dan-Penarikan-Kesimpulan-Penelitian)
(Diakses pada 2 Juni 2017)

sinovik.menpan.go.id/ (Diakses pada 5 Juni 2017)

Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2001 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik.